

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan pada suatu daerah ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang dihasilkan, meliputi nilai output barang dan jasa hasil dari seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, apabila pendapatan yang dihasilkan tersebut tumbuh dapat dipastikan tingkat kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Didalam mengukur pembangunan ekonomi tersebut indikator yang berfungsi sebagai alat ukur di daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Arifin, 2009).

Mengingat pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan penerimaan pendapatan negara menurun, hal ini membuat pemerintah mengatur strategi guna mendorong perekonomian pulih kembali, dengan menyusun kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki pengaruh terhadap kesetabilan harga dan pertumbuhan ekonomi regional (Asmanto & Soebagyo, 2007). Otonomi daerah adalah upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan makro ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat berupa kebijakan fiskal terkait anggaran belanja negara dan pajak. Dimulainya otonomi bermula dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah di amandemen menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan amandemen terakhir Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada dasarnya otonomi daerah atau desentralisasi membuat kemandirian pada pemerintah yang berada di daerah provinsi, kabupaten/kota untuk mengontrol daerahnya dengan berlandaskan peraturan dan berpedoman-pedoman pada pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah membuat terlaksananya desentralisasi keuangan dan fiskal di daerah yang berfungsi agar mempercepat peningkatan pelayanan publik guna mensejahterakan masyarakat dan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang di tandai dengan kenaikan PDRB (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan tingkat PDRB yang relatif kecil di Provinsi Jawa Timur, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,56 persen di tahun 2020. Hal ini tentu perlu perhatian khusus, mengingat Kabupaten Blitar memiliki potensi perkebunan dan peternakan yang unggul sebagai pendongkrak perekonomian dan berpotensi meningkatkan perolehan PDRB yang lebih besar.

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar 1991 - 2020 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB ADHB	Tahun	PDRB ADHB
1991	570.893,18	2006	7.637.803,30
1992	701.687,78	2007	8.697.259,91
1993	862.448,11	2008	9.935.944,23
1994	948.755,34	2009	11.011.462,01
1995	1.035.062,57	2010	16.213.907,24
1996	1.202.128,88	2011	18.013.402,45
1997	1.357.853,94	2012	19.868.514,70
1998	2.159.588,21	2013	21.755.167,86
1999	2.259.348,26	2014	24.140.619,61
2000	3.770.771,91	2015	26.779.686,35
2001	3.967.004,24	2016	29.335.080,94
2002	4.449.207,34	2017	31.574.359,64
2003	5.003.951,33	2018	34.117.382,48
2004	5.688.976,65	2019	36.447.136,40
2005	6.537.312,78	2020	36.023.963,44

Sumber : Badan Pusat Statistika (data diolah 2022)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat tingkat pertumbuhan PDRB ADHB mengalami kondisi meningkat dari tahun 1991 – 2019, namun kemudian mengalami penurunan dari yang semula 36,44 T ditahun 2019 menjadi 36,02 T di tahun 2020, hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020, penurunan juga terjadi pada tahun 1995 dan 1998 karena dipicu kondisi perekonomian yang sedang terjadi.

Didalam teori Keynes menjelaskan permintaan merupakan komponen didalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. permintaan merupakan kegiatan pembelian barang maupun jasa yang diperoleh dari perputaran ekonomi yang mempunyai sifat ketergantungan terhadap pengeluaran agregat (Sugiyanto & Romadhina, 2020). Keynes memiliki konsep kebijakan Fiskal dimana kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah guna menjaga pemasukan dan pengeluaran agar stabil dan dapat memicu pendapatan negara.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2008) membahas tentang Keuangan Negara pasal 16, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk rencana pengeluaran daerah yang ditentukan dalam kurun waktu satu tahun dengan berdasarkan peraturan daerah (Perda). Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah perlu memperhatikan variabel yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan PDRB yaitu variabel pengeluaran pemerintah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Realisasi belanja pemerintah didalam APBD yang memiliki fungsi secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah adalah belanja langsung. Belanja langsung dianggarkan untuk kegiatan yang didistribusikan dan dimanfaatkan sebagai pemacu perekonomian. Sehingga logikanya realisasi belanja langsung ini dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya nilai PDRB di Kabupaten Blitar

Dari data hasil realisasi belanja langsung Kabupaten Blitar pada komponen belanja langsung didalam APBD pada tahun 1991 – 1998 yang paling mendominasi belanja tertinggi berada pada pos belanja modal, kemudian pada tahun 1999 – 2020 didominasi oleh belanja pegawai. Hal tersebut dikarenakan pada masa orde baru Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. pada masa orde baru gencar melakukan pembangunan sehingga alokasi anggaran belanja langsung tersebut tertinggi didominasi oleh belanja modal. Mengingat bahwa alokasi anggaran belanja tepatnya pada belanja langsung yang disusun tersebut dianggarkan untuk kegiatan yang didistribusikan dan dimanfaatkan guna mendorong perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk karena apabila jumlah penduduk manusia tumbuh maka dapat meningkatkan peran manusia dalam meningkatkan produksi sehingga pendapatan akan meningkat (Rochaida, 2016).

Kajian penelitian terdahulu membahas permasalahan mengenai pengaruh belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, jumlah penduduk serta inflasi diteliti oleh (Pusporini I, 2020) didalam penelitiannya menemukan belanja modal berpengaruh positif dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. (Ackmadi, 2019) didalam penelitiannya menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. (Siregar, 2019) didalam penelitiannya menemukan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. (Fahmi, 2017) didalam penelitiannya menemukan belanja pegawai, barang dan jasa serta modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. (Karlina, 2017) didalam penelitiannya menemukan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. (Hutabarat, 2013) didalam penelitiannya menemukan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Dari uraian dan data diatas peneliti tertarik untuk mengkaji serta mengembangkan dari penelitian terdahulu terkait pengaruh belanja pegawai, barang jasa, dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi disepanjang tahun dan ditengah kondisi perekonomian pada tahun 1991 sampai 2020. Peneliti juga menambahkan variabel jumlah penduduk karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah berkaitan dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 1991 – 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dan data yang terdapat di latarbelakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Blitar tahun 1991 – 2020?

### **C. Batasan Masalah**

1. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh komponen didalam belanja pemerintah langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Kabupaten Blitar pada tahun 1991 – 2020.
2. Variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan jumlah penduduk. Variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Kabupaten Blitar tahun 1991 – 2020.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti / Mahasiswa :
  - a. Sebagai alat untuk membangun pengetahuan bagi mahasiswa agar dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, industri atau pemerintahan yang berdasarkan teori-teori yang telah diberikan.
  - b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang agar dapat dikembangkan dalam meningkatkan pembahasan dan kualitas pembelajaran.
2. Bagi Pemerintah :
  - a. Sebagai bahan penilaian yang objektif terhadap kinerja pemerintahan dalam mengalokasikan anggaran dan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang :

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikan penulisan ini sebagai bahan kajian pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian yang selanjutnya.

